

## IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Kota Bandar Lampung

#### 1. Profil Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota provinsi Lampung, Indonesia. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Penduduk Bandar Lampung dapat dibagi menjadi dua *jurai* yaitu jurai asli yang merupakan penduduk asli bersuku Lampung dan *jurai* pendatang, yaitu penduduk dari provinsi lain yang tinggal dan menetap di Lampung.

Provinsi Lampung juga merupakan daerah penerima migrasi penduduk Indonesia, dari masa kolonisasi hingga transmigrasi, sehingga penduduk Lampung pun terdiri dari beragam etnis. Tak hanya lewat program transmigrasi, banyak pula penduduk dari provinsi lain yang merantau ke Bandar Lampung untuk mengadu nasib. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.446.160 jiwa (Berdasarkan sensus penduduk 2012). Kepadatan penduduk sekitar 5.304 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada

tahun 2030. Selain itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batu bara dari Sumatera ke Jawa, sehingga Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung ekonomi nasional.

## **2. Profil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung**

Kecamatan Kedaton merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Bandar Lampung. Kecamatan Kedaton memiliki luas wilayah 1.088 Ha, yang secara administratif berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat

Secara administratif, Kecamatan Kedaton dibagi menjadi tujuh kelurahan, yaitu Kelurahan Kedaton, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Surabaya, Kelurahan Sukamenanti, Kelurahan Penengahan, Kelurahan Sukamenanti Baru, dan Kelurahan Penengahan Raya. Jumlah penduduk Kecamatan Kedaton pada tahun 2013 berjumlah 47.197 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 23.592 jiwa dan untuk perempuan sebanyak 23.605 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kedaton Tahun 2013**

No	Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1	Kedaton	6.141	5.996
2	Sidodadi	5.160	5.267
3	Surabaya	5.208	5.339
4	Sukamenanti	1.655	1.603
5	Penengahan	1.512	1.624
6	Sukamenanti Baru	1.869	1.826
7	Penengahan Raya	2.047	1.950
Jumlah		23.592	23.605

(Sumber: Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan Kedaton, 2014)

Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, Kecamatan Kedaton juga memiliki jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tinggi pula. Jumlah PUS di Kecamatan Kedaton terus meningkat setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Kedaton Tahun 2010-2013**

No	Kelurahan	Jumlah Pasangan Usia Subur (15-49 tahun)			
		2010	2011	2012	2013
1	Kedaton	1.974	1.983	1.991	2.004
2	Sidodadi	1.976	2.005	2.015	2.022
3	Surabaya	1.430	1.449	1.463	1.478
4	Sukamenanti	604	614	607	621
5	Penengahan	512	677	669	673
6	Sukamenanti Baru	603	613	628	639
7	Penengahan Raya	497	529	612	624
		7.596	7.870	7.985	8.061

Sumber: PLKB Kecamatan Kedaton, 2014

Di Kecamatan Kedaton terdapat 9.892 Kepala Keluarga dengan sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Kedaton yang merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 379 orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 3.186 orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 4.948

orang, dan lulusan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 1.379 orang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kedaton Tahun 2013**

No	Kelurahan	Tidak Tamat SD	Tamat SD-SLTP	Tamat SLTA	Tamat PT
1	Kedaton	54	752	1460	156
2	Sidodadi	178	697	855	413
3	Surabaya	15	605	1008	390
4	Sukamenanti	51	319	330	54
5	Penengahan	19	89	486	115
6	Sukamenanti Baru	40	437	365	58
7	Penengahan Raya	12	287	483	193
Jumlah		379	3.186	4.948	1.379

(Sumber: Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan Kedaton, 2014)

### 3. Profil Kecamatan Panjang Bandar Lampung

Kecamatan Panjang merupakan sebagian wilayah Kota Bandar Lampung yang secara administratif dibagi menjadi delapan kelurahan, yaitu Kelurahan Srengsem, Kelutahan Karang Maritim, Kelurahan Panjang Selatan, Kelurahan Panjang Utara, Kelurahan Pidada, Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Ketapang, dan Kelurahan Kuala. Secara administratif, Kecamatan Panjang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Selatan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Katibung Lampung Selatan
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur
4. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Lampung

Luas wilayah Kecamatan panjang adalah 2.326 Ha. Jumlah penduduk Kecamatan Panjang pada tahun 2013 sebanyak 71.495 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Panjang Tahun 2013**

No	Kelurahan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1	Srengsem	4.527	4.508
2	Karang Maritim	4.976	4.800
3	Panjang Selatan	6.429	6.506
4	Panjang Utara	6.894	6.627
5	Pidada	6.049	5.569
6	Way Lunik	4.572	4.480
7	Ketapang	1.746	1.573
8	Ketapang Kuala	1.153	1.086
Jumlah		36.346	35.149

(Sumber: Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan Panjang, 2014)

Jumlah PUS di Kecamatan Panjang juga termasuk tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Bandar Lampung. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 11.682 PUS di Kecamatan Panjang, jumlah tersebut meningkat sebanyak sepuluh persen menjadi 12.966 PUS pada tahun 2013. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 Jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Panjang Tahun 2010-2013**

No	Kelurahan	Jumlah Pasangan Usia Subur (15-49 tahun)			
		2010	2011	2012	2013
1	Srengsem	1.404	1.470	1.502	1.508
2	Karang Maritim	1.693	1.629	1.659	1.660
3	Panjang Selatan	2.268	1.997	2.001	2.008
4	Panjang Utara	2.339	2.379	2.382	2.389
5	Pidada	2.024	2.281	2.328	2.330
6	Way Lunik	1.134	1.099	1.948	1.951
7	Ketapang	820	796	611	612
8	Ketapang Kuala	-	-	505	508
Jumlah		11.682	11.651	12.936	12.966

Sumber: PLKB Kecamatan Panjang, 2014

Di Kecamatan Panjang terdapat sebanyak 15.606 Kepala Keluarga dengan sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Panjang yang merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.833 orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP) sebanyak 6.695 orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 5.288 orang, dan lulusan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 790 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Panjang Tahun 2013**

No	Kelurahan	Tidak Tamat SD	Tamat SD/SLTP	Tamat SLTA	Tamat PT
1	Srengsem	288	870	616	118
2	Karang Maritim	389	974	640	82
3	Panjang Selatan	635	1149	817	172
4	Panjang Utara	277	1308	1083	164
5	Pidada	701	1294	849	176
6	Way Lunik	344	708	854	42
7	Ketapang	119	235	257	58
8	Ketapang Kuala	80	157	172	38
Jumlah		2.833	6.695	5.288	790

(Sumber: Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan Panjang, 2014)

Mata pencaharian utama masyarakat panjang, yaitu terdiri atas PNS, TNI/POLRI, perdagangan, pertanian, tukang dan buruh. Dari beberapa mata pencaharian utama tersebut, mayoritas penduduk di Kecamatan Panjang memiliki pekerjaan sebagai buruh, kemudian diikuti di bidang perdagangan dan tukang. Untuk lebih jelasnya, mata Pencaharian masyarakat Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7 Tingkat Pekerjaan Utama Masyarakat Panjang Tahun 2013**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.694
2	TNI/POLRI	230
3	Perdagangan	12.092
4	Pertanian	1.305
5	Tukang	1.855
6	Buruh	16.699
7	Pensiun	750
8	Lainnya	21.585
Jumlah		56.210

Sumber: Profil Kecamatan Panjang, 2014

## **B. Gambaran Umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kota Bandar Lampung**

### **1. Profil BKKBPP Kota Bandar Lampung**

Upaya pemerintah dalam hal mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program keluarga berencana nasional yang secara resmi dimulai pada tahun 1970. Lembaga yang menangani hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, lembaga ini berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan tugas utama urusan program keluarga berencana dan penyerasian kebijakan kependudukan. Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan struktur yang lama yaitu penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan program KB di Provinsi menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan untuk Kabupaten/Kota, pelaksanaan programnya telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang 32 Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan daerah melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi) yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Program KB adalah salah satu urusan pemerintah yang diserahkan Kepala Daerah pada Tahun 2004. Namun demikian pada kenyataannya, urusan yang diserahkan hanyalah untuk Kabupaten/Kota,

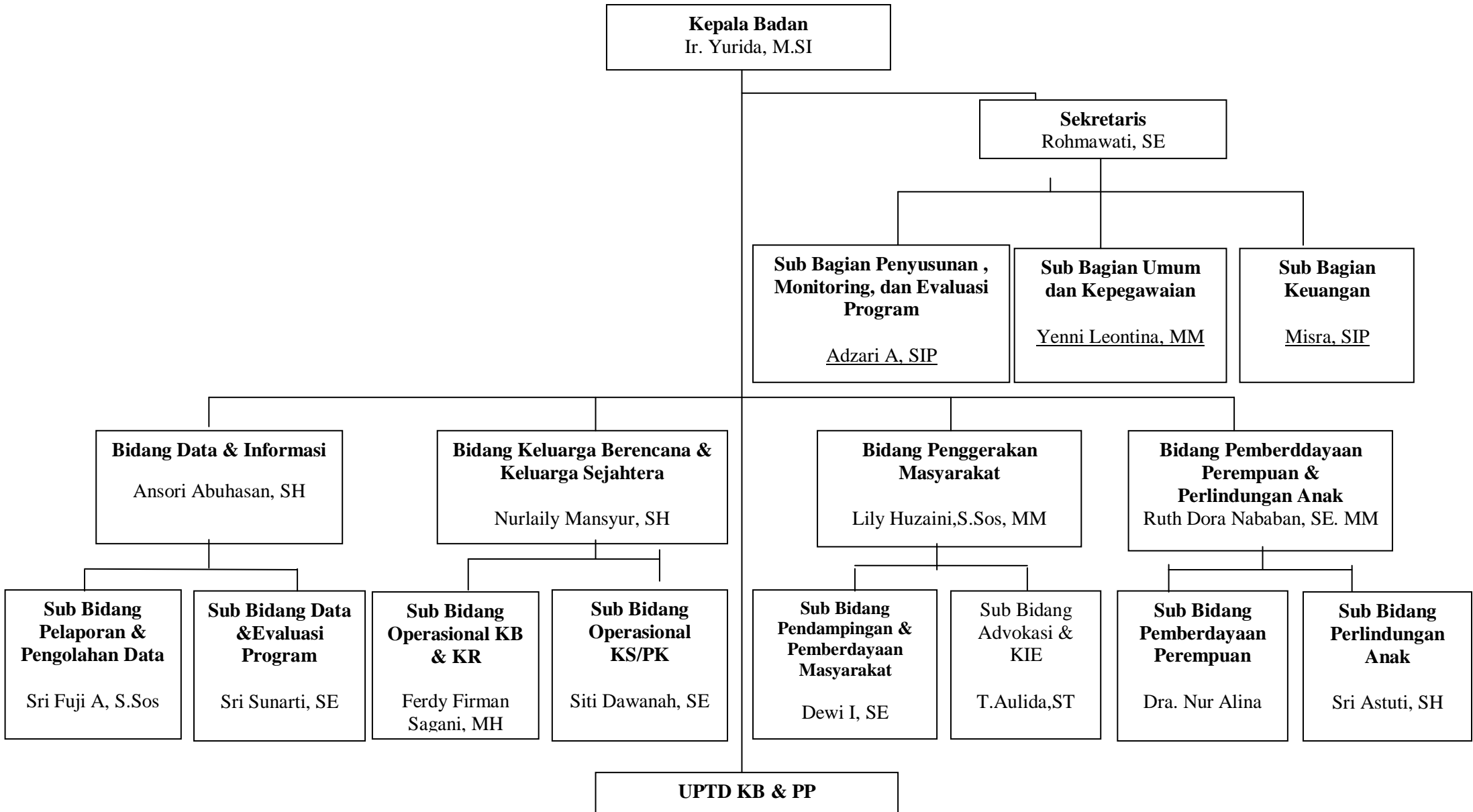
sedangkan pengelolaan program KB di tingkat Provinsi masih tetap diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi vertikal. Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang mengenai pengelolaan program KB ada dua lembaga sebagai pelaksananya, yaitu:

1. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Provinsi Lampung sebagai instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN Provinsi Lampung adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap sebagai instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan program KB di Provinsi Lampung.
2. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pengelolanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). BKKBPP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung. BKKBPP Kota Bandar Lampung merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.



**Bagan 4.1 Struktur Organisasi BKKBPP Kota Bandar Lampung**



## **2. Visi dan Misi BKKBPP Kota Bandar Lampung**

Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung adalah “ Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”, sedangkan misi dari BKKBPP kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mewujudkan kinerja sumber daya manusia yang baik disatukan kerja perangkat daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pengelola program baik dengan lembaga pemerintah ataupun pihak swasta
3. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
4. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas melalui penggalangan kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
6. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB nasional
8. Mempersiapkan pengembangan SDM berpotensi sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut
9. Menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro untuk pengelolaan, menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin.